

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEMISKINAN DI KABUPATEN/KOTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2011-2017

Aditya Dwi Saputra

Prodi Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Aditsaputra582@gmail.com

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa besar pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB, Pendidikan, Jumlah Penduduk, Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) pada kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Tingkat Kemiskinan. Penelitian ini dilakukan dengan mengambil data dari BPS yang berupa data sekunder selama periode 2011-2017 dengan bantuan program stata13, dan menggunakan metode data panel yaitu melalui kombinasi empat kabupaten dan satu kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel PDRB dan Pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Variabel Upah Minimum Kabupaten/Kota berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Sedangkan variabel Jumlah Penduduk berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Kata Kunci: PDRB, Pendidikan, Upah Minimum Kabupaten/Kota, Jumlah Penduduk.

ABSTRACT

This study aims to see how much influence the Gross Regional Domestic Product (GRDP, Education, Population Number, Regency / City Minimum Wage) in districts / cities in the Special Region of Yogyakarta Province on Poverty Levels This study was conducted by taking data from BPS which in the form of secondary data during the period 2011-2017 with the help of the stata13 program, and using the panel data method, namely through a combination of four districts and one city in the Special Region of Yogyakarta.

The results of this study indicate that the GRDP and Education variables have a negative and significant effect on poverty levels. Regency / City Minimum Wage Variable has a negative and not significant effect on poverty levels. While the population number has a positive and not significant effect on poverty levels.

Keywords: GRDP, Education, Regency / City Minimum Wage, Population Amount

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan sosial ekonomi dalam kehidupan masyarakat dan negara. Banyaknya pekerjaan sektor informal, jumlah penduduk yang melebihi jumlah lapangan pekerjaan dan kualitas manusia yang rendah menjadikan permasalahan kemiskinan terjadi di berbagai negara. Standar Internasional kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang mengalami kehilangan kesejahteraan (*deprivation of well-being*) dengan jumlah konsumsi \$1,9/hari (World Bank, 2000). Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik (2000), kemiskinan adalah ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak (baik pangan maupun non-pangan) dengan jumlah konsumsi Rp 387.160/bulan. Dalam konteks negara Indonesia, kemiskinan memiliki pengertian yang sedikit berbeda dengan kriteria dunia karena seseorang dapat dikategorikan sebagai penduduk miskin apabila rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah garis kemiskinan menurut (BPS, 2000).

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan 33 provinsi. Tingkat kemiskinan tiap provinsi juga berbeda-beda, tergantung pada jumlah penduduk di provinsi tersebut, tingkat pendidikan, dan faktor-faktor lain yang berpengaruh pada tingkat kemiskinan di suatu daerah. Dalam mengukur keberhasilan sebuah negara, kemiskinan merupakan elemen yang harus dihilangkan. Dikarenakan jika dalam suatu negara memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi, hal tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi (Produk Domestik Bruto) yang melambat (Shafira,

2017). Usaha penekanan tingkat kemiskinan dilakukan oleh setiap negara untuk mencapai kesejahteraan negara.

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terdiri dari lima kabupaten dan satu kota. Di lima kabupaten dan satu kota yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki tingkat kemiskinan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Untuk mengurangi tingkat kemiskinan yang ada di lima kabupaten/kota Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat beberapa faktor yang dapat membantu menurunkan tingkat kemiskinan antara lain Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pendidikan, Upah Minimum Kabupaten, dan Jumlah Penduduk Santiko (2009), Ayu (2018), Rahmawati (2017), Shafira (2017), dan Wibisono (2015).

PDRB dapat mengentas kemiskinan dengan pemanfaatan sektor yang lebih potensial melalui pengembangan di sektor pariwisata, perkebunan, pertanian, dan industri. Dengan kenaikan PDRB akan mengurangi jumlah kemiskinan tiap tahunnya. Program-program pemerintah yang dilaksanakan berdasarkan sumber PDRB seperti training keterampilan, binaan UMKM dan bantuan non tunai akan mendorong masyarakat untuk mengikuti program tersebut, yang pada akhirnya dapat mengurangi tingkat kemiskinan (Nurfauziah, 2018). Selain itu, Salah satu faktor terpenting untuk keluar dari kemiskinan adalah pendidikan. Pendidikan akan memberikan pengaruh dalam jangka panjang dalam memperbaiki kehidupan ekonomi keluarga pada tingkat tertentu (Wibisono, 2015). Pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk memperoleh pekerjaan, tetapi juga dibutuhkan berfungsi sebagai pengasah kreativitas, peningkatan daya pikir, pembentukan pola pikir dan

daya saing dalam menjalankan rutinitasnya. Hal ini sesuai dengan teori pertumbuhan baru yang menekankan pentingnya peran pemerintah dalam meningkatkan pembangunan modal manusia (*human capital*).

Indikator berikutnya yang juga merupakan faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan yaitu Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Upah Minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap yang berlaku untuk seluruh Kabupaten/Kota di satu Provinsi (Kuswantoro & Dewi, 2016). Menurut Ayu (2018), upah memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan. Jika upah yang ditetapkan tinggi maka tingkat konsumsi juga akan ikut meningkat yang diiringi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat karena masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya. Indikator selanjutnya yang berpengaruh dalam tingkat kemiskinan adalah jumlah penduduk. Secara umum penduduk adalah total manusia yang berdomisili atau bertempat tinggal di dalam wilayah di suatu negara dan menempati suatu wilayah tertentu dalam waktu yang lama atau jangka pendek (Santiko, 2009).

Oleh karena itu, dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pendidikan, Upah Minimum Kabupaten (UMK), dan Jumlah penduduk, diharapkan dapat membantu pemerintah Daerah dalam mengentaskan kemiskinan. Sehingga kebijakan yang diterapkan dapat memberikan efek yang signifikan terhadap pengurangan tingkat kemiskinan.

Berdasarkan beberapa uraian dan data tersebut, penulis merasa tertarik untuk mengetahui bagaimana “*Analisis Pengaruh PDRB, Tingkat Pendidikan, Upah Minimum Kabupaten/Kota, dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode Tahun 2011-2017*”.

METODE PENELITIAN

Subjek pada penelitian ini adalah lima kabupaten dan satu kota yang berada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan variabel dependen adalah tingkat kemiskinan dan variabel independen yaitu PDRB, Pendidikan, Upah Minimum Kabupaten/Kota, dan Jumlah Penduduk. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Metode ini menggunakan alat bantu kuantitatif berupa software *Stata13* dalam mengelola data tersebut. Data kuantitatif ini berupa data *timeseries* yaitu data yang disusun menurut waktu pada variabel tertentu dan data *cross section* data yang memiliki objek yang banyak pada tahun yang sama atau data yang dikumpulkan dalam satu waktu terhadap banyak objek. Pada penelitian ini menggunakan data sekunder. Sumber data penelitian ini didapat antara lain seperti Badan Pusat Statistik Provinsi DIY, Dinas-Dinas, jurnal, dan website. Data yang diambil yaitu data yang berkaitan dengan variabel penelitian seperti data Produk Domestik Regional Bruto, Pendidikan, Upah Minimum Kabupaten/Kota, Jumlah Penduduk, dan Tingkat Kemiskinan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Uji Kualitas Data

Dalam penelitian kali ini akan menggunakan uji asumsi klasik untuk menguji kualitas data. Uji asumsi klasik yang digunakan adalah uji heterokedastisitas dan uji multikolinearitas.

1. Uji Heterokedastisitas

Berdasarkan uji asumsi klasik maka uji heterokedastisitas merupakan hal yang wajib untuk dilakukan, nilai probabilitas independen tidak signifikan berada pada derajat 5% menunjukkan bahwa terdapat varian yang sama atau terjadi homokedastisitas antara nilai-nilai variabel independen dengan setiap variabelnya. Berikut adalah hasil uji heterokedastisitas dengan menggunakan Breusch-Pagan:

TABEL 5.1
Uji Heterokedastisitas

Chi² (1)	Pro>chi²
2,63	0,1046

Sumber: Data Diolah, 2019

Berdasarkan uji heterokedastisitas diatas menunjukkan bahwa nilai probabilitas chi2 sebesar 0,1046 yaitu $> 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa data variabel independent terbebas dari masalah heterokedastisitas.

2. Uji Multikolinearitas

Untuk mengetahui adanya multikolinearitas pada data penelitian maka perlu dilakukan dengan menguji koefisien korelasi antar variabel penelitian. Suatu model dikatakan baik apabila tidak terjadi

multikolinearitas antar variabel dependen dengan variabel independen (Gujarati, 2006).

Menurut (Basuki & Yuliadi, 2015) semakin kecil korelasi antar variabel bebas, maka model regresi akan semakin baik. Pada uji multikolinearitas dapat dikatakan bebas dari multikolinearitas jika signifikansi variabel < 10 .

TABEL 5.2
Uji Multikolinearitas (VIF)

Variabel	VIF	1/VIF
Pendidikan	2,22	0,450862
PDRB	2,06	0,485652
UMK	1,14	0,877181
JP	1,10	0,908612
Mran VIF	1,63	

Sumber: Data Diolah, 2019

Berdasarkan uji multikolinearitas diatas bahwa nilai dari VIF antar variabel adalah < 10 dengan rata-rata VIF sebesar 1,63. Hal tersebut menandakan bahwa data dalam penelitian ini terbebas dari masalah multikolinearitas.

B. Analisis Pemilihan Model

1. Uji Chow

Uji Chow merupakan pengujian dimana untuk menentukan model *Fixed Effect* dan *Common Effect* yang paling digunakan dalam mengestimasi data panel. Jika hasil uji chow menyatakan menerima hipotesis nol maka model yang terbaik untuk digunakan adalah model

Common Effect. Tetapi, jika hasilnya menyatakan menolak hipotesis nol maka model terbaik yang digunakan adalah model *Fixed Effect*.

TABEL 5.3
Uji Chow

Test Summary	Probabilitas
F(4,26) = 2,62	0,0582

Sumber: Data Diolah, 2019

Berdasarkan dari uji chow diatas ditemukan bahwa D statistic (Prob > F) memiliki nilai 0,0582 atau > 0,05 maka H0 diterima dan H1 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa model terbaik yang digunakan dalam regresi data panel penelitian ini adalah model *Common Effect*.

2. Uji Hausman

Uji Hausman digunakan untuk memilih model mana yang terbaik dari regresi data panel. Model penentuan yang digunakan adalah model *Fixed Effect* dan model *Random Effect*. Jika hasil uji hausman menyatakan menerima hipotesis nol maka model terbaik untuk digunakan adalah model *Random Effect*, namun jika hasilnya menolak hipotesis nol maka model terbaik yang digunakan adalah model *Fixed Effect*.

TABEL 5.4
Uji Hausman

Chi2	Prob>Chi2
2,17	0,7041

Sumber: Data Diolah, 2019

Berdasarkan uji hausman yang sudah dilakukan dapat dilihat hasil nilai chi2 lebih besar dari 0,05 yaitu 0,7041 yang berarti menerima H0

dan menolak H1. Jadi, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan uji hausman model terbaik yang digunakan adalah *Random Effect*.

C. Hasil Estimasi Model Regresi Data Panel

Setelah menggunakan pengujian statistik untuk menggunakan model mana yang terbaik untuk digunakan dalam estimasi data panel, maka disimpulkan bahwa model terbaik adalah *Random Effect*. Akan digunakan untuk penelitian kali ini, yakni pendekatan model data panel yang mengkombinasikan data *Time Series* dan *Cross Section*. Berikut merupakan tabel yang menunjukkan hasil estimasi data dengan *Random Effect Model*.

TABEL 5.5
Hasil Estimasi Model *Random Effect*

Variabel Dependen: KEMISKINAN	Koefisien	Standar Error	Probabilitas
PDRB	-13,34404	0,6106597	0,000
JP	1,254471	0,6450082	0,052
UMK	-0,356416	1,245836	0,775
PENDIDIKAN	-1,673159	0,0849775	0,000

Sumber: Data Diolah, 2019

Dari hasil estimasi tabel diatas, maka dapat dibuat model analisis data panel model *Random Effect* yang disimpulkan dengan persamaan:

$$KEMISKINAN_{it} = \alpha + \beta_1 PDRB_{it} + \beta_2 JP_{it} + \beta_3 UMK_{it} + \beta_4 PENDIDIKAN + e_{it}$$

Keterangan:

KEMISKINAN = Variabel Dependen (KEMISKINAN)

α = Konstanta

β_{1234} = Koefisien Variabel 1,2,3,4

PDRB = Produk Domestik Regional Bruto

JP = Jumlah Penduduk

UMK	= Upah Minimum Kabupaten
PENDIDIKAN	= Pendidikan
i	= Sleman, Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo, Jogja
t	= 2011-2017

Dimana didapatkan hasil sebagai berikut:

$$KEMISKINAN_{IT} = a + \beta_1 PDRB_{it} + \beta_2 JP_{it} + \beta_3 UMK_{it} + \beta_4 PENDIDIKAN_{it} + e_{it}$$

$$KEMISKINAN = 120,5076 + -13,34404 PDRB_{it} + 1,254471 JP_{it} + -0,356416 UMK_{it} + -1,673159 PENDIDIKAN_{it}$$

Keterangan:

a = Dengan nilai sebesar 120,5076 dapat dijelaskan bahwa apabila semua variabel independent (PDRB, JP, UMK, dan PENDIDIKAN) dianggap konstan atau tidak mengalami perubahan maka kemiskinan sebesar 120,5076.

β_1 = Nilai sebesar -13,34404 dapat dijelaskan bahwa ketika jumlah PDRB naik sebesar 1% maka kemiskinan akan mengalami penurunan 13,34404% dengan asumsi kemiskinan tetap.

β_2 = Nilai sebesar 1,254471 dapat dijelaskan bahwa ketika jumlah penduduk naik sebesar 1% maka kemiskinan akan mengalami kenaikan 1,254471 juta jiwa dengan asumsi kemiskinan tetap.

β_3 = Nilai sebesar -0,356416 dapat dijelaskan bahwa ketika jumlah Upah Minimum Kabupaten naik sebesar 1% maka kemiskinan akan mengalami penurunan 0,356416% dengan asumsi kemiskinan tetap.

β_4 = Nilai sebesar -1,673159 dapat dijelaskan bahwa ketika jumlah pendidikan naik sebesar 1% maka kemiskinan akan mengalami penurunan 1,673159% dengan asumsi kemiskinan tetap.

D. Uji Statistik

Dalam penelitian ini dilakukan uji statistik meliputi uji parsial (T-statistik), uji simultan (F-statistik), dan koefisien determinasi (R^2).

1. Uji Parsial (T-statistik)

Uji T-statistik atau uji parsial ini dilakukan untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel independen (PDRB, JP, UMK, PENDIDIKAN) terhadap variabel dependen. Uji parsial ini dapat diketahui dengan cara melihat koefisien regresi dan probabilitas dari setiap variabel independen serta dengan melihat standar probabilitas $\alpha < 0,05$.

TABEL 5.6
Uji Statistik

Variabel	T-Statistik	Prob	Standar Error
PDRB	-21.85	0.000	0.6106597
JP	1.94	0.052	0.6450082
UMK	-0.29	0.775	1.245836
PENDIDIKAN	-19.69	0.000	0.0849775

Sumber: Data Diolah, 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa:

- a. Pengaruh PDRB terhadap kemiskinan berdasarkan hasil analisis didapatkan nilai t-hitung sebesar -21.85, dengan probabilitas sebesar 0,000 signifikan pada $\alpha = 5\%$. Jadi dapat diketahui bahwa PDRB berpengaruh negatif dan signifikan 5% terhadap kemiskinan.
- b. Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap kemiskinan berdasarkan hasil analisis didapatkan nilai t-hitung sebesar 1.94, dengan probabilitas sebesar 0.052 signifikan pada $\alpha = 5\%$. Jadi dapat diketahui bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif dan tidak signifikan 5% terhadap kemiskinan.
- c. Pengaruh Upah Minimum Kabupaten terhadap kemiskinan berdasarkan hasil analisis didapatkan nilai t-hitung sebesar -0.29, dengan probabilitas 0.775 signifikan pada $\alpha = 5\%$. Jadi dapat diketahui bahwa Upah Minimum Kabupaten berpengaruh negatif dan tidak signifikan 5% terhadap kemiskinan.
- d. Pengaruh pendidikan terhadap kemiskinan berdasarkan hasil analisis didapatkan nilai t-hitung sebesar -19.69, dengan probabilitas 0.000 signifikan pada $\alpha = 5\%$. Jadi dapat diketahui bahwa pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan 5% terhadap kemiskinan.

2. Uji Simultan (F-statistik)

Uji simultan atau uji f-statistik dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara simultan atau keseluruhan terhadap variabel dependennya. Berdasarkan dari estimasi hasil regresi yang didapatkan menggunakan pengolahan data panel dengan menggunakan metode

Random Effect Models pada *Stata13*, didapatkan nilai probabilitas F-statistik sebesar 0.0000 dengan standar probabilitas pada 0,05 ($\alpha = 5\%$). Berdasarkan hasil yang didapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama variabel independen PDRB, Jumlah Penduduk, Upah Minimum Kabupaten, dan Pendidikan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen kemiskinan.

3. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi atau R kuadrat dapat berfungsi untuk mengetahui seberapa besar model dapat menerangkan pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai dari koefisien determinasi ini terletak dari rentang nol sampai satu. Semakin angkanya mendekati nol maka hal tersebut menandakan terbatasnya kemampuan variabel independent dalam menjelaskan variasi dari variabel dependennya, namun jika semakin angkanya mendekati satu, maka hal tersebut dapat dikatakan bahwa variabel independent yang terdapat dalam model mampu menerangkan prediksi informasi terhadap setiap perubahan dari variabel dependen.

Berdasarkan dari hasil analisis menggunakan *Random Effect Model*, maka diperoleh nilai *R-square* sebesar 0.9908 yang artinya 99,08% variasi pada variabel dependen kemiskinan dapat dijelaskan oleh variasi pada variabel independen (PDRB, Jumlah Penduduk, Upah Minimum Kabupaten, dan Pendidikan) selama periode waktu penelitian. Sedangkan

sisanya yaitu sebesar 0,92% lainnya dijelaskan oleh variabel lain di luar dari penelitian ini.

E. Interpretasi Ekonomi

Setelah mendapatkan hasil estimasi model regresi data panel, selanjutnya adalah membahas interpretasi variabel independen, yaitu PDRB, Jumlah Penduduk, Upah Minimum Kabupaten, dan Pendidikan, terhadap variabel dependen Kemiskinan. Analisis dan pembahasan ini bertujuan untuk menginterpretasikan hasil dari pengolahan data panel ke dalam teori ekonomi yang telah ada.

1. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Kemiskinan

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa variabel PDRB memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan. Semakin besar jumlah PDRB yang didapatkan, semakin berkurang jumlah kemiskinan. Nilai dari koefisien regresi PDRB sebesar $-13,34404$ dalam kondisi ini memiliki arti bahwa setiap PDRB meningkat sebesar 1% maka akan menyebabkan penurunan kemiskinan sebesar 13,34%. Kemudian jika dilihat dari hasil pengujian terhadap probabilitas yang diperoleh bernilai sebesar 0,000 yang lebih kecil dari $\alpha = 5\%$ dalam hal ini menyatakan bahwa variabel PDRB berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan pada lima kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada periode tahun 2011-2017.

PDRB merupakan salah satu pendapatan di tiap daerah yang dapat membantu mengurangi jumlah kemiskinan. Hal tersebut dapat terealisasi jika pertumbuhan ekonomi tersebut harus efektif dalam mengurangi kemiskinan. Artinya bahwa pertumbuhan ekonomi tersebut dapat menyebar disetiap lapisan golongan pendapatan masyarakat termasuk golongan penduduk miskin (Syahrullah, 2014).

PDRB juga merupakan indikator untuk mengatur sampai sejauh mana keberhasilan pemerintah dalam memanfaatkan sumber daya yang ada dan dapat digunakan sebagai alat untuk perencanaan dan pengambilan keputusan yang salah satunya untuk mengurangi jumlah kemiskinan. Untuk di DIY sendiri tindakan agar dapat meningkatkan PDRB bisa dikatakan cukup berhasil. Hal ini bisa dilihat dari hasil penelitian diatas bahwa kenaikan PDRB dapat membantu mengurangi jumlah kemiskinan di DIY (Rahmawati, 2017).

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Permana, Anggit Yoga dan Arianti (2012), Nugroho (2015), Shafira (2017), dan Ayu (2018) yang menyatakan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Mereka menyatakan bahwa untuk meningkatkan PDRB di Kabupaten/Kota yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang rendah atau kurang berkembang perlu adanya melakukan kerjasama dengan Kabupaten/Kota yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Mulai dari peningkatan produksi dan pengembangan di

sektor-sektor yang lebih potensial serta pembangunan infrastruktur secara merata agar meningkatkan kualitas ataupun kuantitas masyarakat agar mencapai kesejahteraan. Sehingga dengan adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi tersebut berarti meningkatnya PDRB secara efektif dapat membantu mengentaskan kemiskinan.

Namun penelitian ini tidak sesuai dengan Kurniawati (2019) yang menyatakan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Karena terjadi ketidakmerataan pendistribusian dari PDRB tersebut. Kesejahteraan masyarakat hanya dinikmati sebagian masyarakat saja, tetapi peningkatan tersebut tidak dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat. Hal tersebut menyebabkan kemiskinan belum dapat dientaskan dengan adanya peningkatan PDRB.

Oleh karena itu terdapat beberapa kebijakan yang dapat membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan. Pertama, perlunya kerjasama antar pemerintah daerah dengan pemerintah pusat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang masih rendah atau tertinggal. Pemerintah pusat dapat membantu pemerintah daerah dengan cara memacu infrastruktur dan mempercepat pemerataan pembangunan di daerah yang pertumbuhan ekonominya masih rendah atau tertinggal. Hal ini dapat mengurangi ketimpangan antar daerah satu dengan yang lainnya. Sehingga kesejahteraan antar daerah dapat merata dan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Selanjutnya adalah

pemanfaatan sektor-sektor yang lebih potensial di setiap daerah seperti pariwisata, pertanian, perkebunan, industri, dan perdagangan (Kuswanto dan Dewi, 2016).

2. Pengaruh Pendidikan terhadap Kemiskinan

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa variabel pendidikan memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan. Semakin tinggi pendidikan yang didapatkan, semakin berkurang jumlah kemiskinan. Nilai dari koefisien regresi pendidikan sebesar -1.673159 dalam kondisi ini memiliki arti bahwa setiap pendidikan meningkat sebesar 1% maka akan menyebabkan penurunan kemiskinan sebesar 1.67%. Kemudian jika dilihat dari hasil pengujian terhadap probabilitas yang diperoleh bernilai sebesar 0,000 yang lebih kecil dari $\alpha = 5\%$ dalam hal ini menyatakan bahwa variabel pendidikan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan pada lima kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada periode tahun 2011-2017.

Pendidikan mempunyai peranan penting untuk peningkatan kualitas manusia, baik dalam arti perkembangan intelektual maupun keterampilan profesional. Pendidikan pada penelitian ini dapat membantu mengentaskan kemiskinan yang ada pada Daerah Istimewa Yogyakarta. Pendidikan memiliki manfaat yang cukup besar untuk dapat membantu masalah kemiskinan yang ada. Manfaat pendidikan bagi masyarakat pedesaan sebagai syarat untuk keluar dari masalah kemiskinan, yakni

dapat membantu masyarakat pedesaan dari belenggu kemiskinan, keterbelakangan, kebodohan, dan penindasan (Nurfauziah, 2018).

Selain itu, pendidikan yang baik seharusnya berfungsi juga sebagai sarana pemberdayaan individu dan masyarakat desa khususnya guna menghadapi masa depan. Pendidikan difokuskan melalui sekolah, pesantren, kursus-kursus yang didirikan di pedesaan yang masyarakatnya masih kurang pemahaman akan ilmu. Masyarakat pedesaan yang terberdayakan sebagai hasil pendidikan yang baik dapat memiliki nilai tambah dalam kehidupan yang tidak dimiliki oleh masyarakat yang tidak mengenyam pendidikan sama sekali (Putra dan Arka, 2016). Sehingga, peranan pendidikan sebagai kebutuhan pokok yang mendasar harus dapat terpenuhi bagi masyarakat pedesaan. Manfaat lainnya adalah meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan hidup yang berkelanjutan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Didu dan Fauzi (2016), Nurfauziah (2017), dan Rahmawati (2017) yang menyatakan bahwa pendidikan berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan. Mereka berpendapat bahwa ketika pendidikan seseorang semakin tinggi maka tingkat kemiskinan akan kecil. Dikarenakan ketika memiliki kualitas pendidikan yang baik maka taraf hidup dan kesejahteraan juga akan ikut meningkat (Didu dan Fauzi, 2016). Namun tidak lupa juga peran pemerintah juga sangat penting untuk ikut serta dalam meningkatkan kualitas pendidikan di daerah tersebut.

Namun penelitian ini tidak sesuai dengan Syahrullah Dio (2014) yang menyatakan bahwa pendidikan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan. Karena pada era globalisasi seperti ini pendidikan hanya sampai wajib belajar (9 tahun) merupakan hal yang biasa. Tidak cukup dengan bekal pendidikan itu saja orang dapat terhindar dari kemiskinan tapi juga harus memiliki keterampilan yang memadai.

Oleh karena itu terdapat beberapa kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah untuk membantu pengentasan kemiskinan. Pertama, pemetaraan pendidikan, misalnya beasiswa miskin, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan program peningkatan pendidikan lainnya (Syahrullah, 2014). Dengan adanya beasiswa miskin dan BOS masyarakat yang tidak memiliki biaya untuk melanjutkan pendidikan dapat kembali sekolah. Kemudian bantuan untuk masyarakat kurang mampu agar mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Selanjutnya dengan adanya wajib belajar, beasiswa bagi putra-putri terbaik, serta program khusus yang dilakukan pemerintah.

Pendidikan di DIY memiliki pengaruh untuk mengentaskan tingkat kemiskinan yang ada. Oleh karena itu, beberapa kebijakan tersebut dapat dimaksimalkan oleh pemerintah untuk membantu meningkatkan pendidikan yang ada pada masyarakat (Nurfauziah, 2018).

Berdasarkan hasil penelitian Sitepu (2010), terdapat peran penting pemerintah dalam meningkatkan pembangunan modal manusia (*Human Capital*). Langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah dengan

melakukan investasi pendidikan. Dikarenakan akan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ditunjukkan dengan meningkatnya pengetahuan dan keterampilan seseorang. Sehingga, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka pengetahuan dan keahlian juga akan ikut meningkat dan dapat mendorong peningkatan produktivitasnya.

3. Pengaruh Jumlah Penduduk (JP) terhadap Kemiskinan

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa variabel Jumlah Penduduk memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap kemiskinan. Nilai dari koefisien regresi Jumlah Penduduk sebesar 1.254471 dalam kondisi ini memiliki arti bahwa setiap Jumlah Penduduk meningkat sebesar 1% maka akan menyebabkan kenaikan kemiskinan sebesar 1.25%. Kemudian jika dilihat dari hasil pengujian terhadap probabilitas yang diperoleh bernilai sebesar 0,052 yang lebih besar dari $\alpha = 5\%$ dalam hal ini menyatakan bahwa variabel Jumlah Penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan pada lima kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada periode tahun 2011-2017.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Septajaya (2014) yang menyatakan bahwa Jumlah Penduduk berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan. Hal ini dikarenakan dalam pembangunan ekonomi suatu daerah jumlah penduduk merupakan permasalahan yang mendasar. Karena pertumbuhan penduduk yang terus meningkat menyebabkan tidak tercapai tujuan pembangunan ekonomi yaitu kesejahteraan rakyat serta menekan angka kemiskinan.

Menurut Todaro (2000), besarnya jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Hal itu dibuktikan dalam perhitungan indeks *Foster Greer Thorbecke (FGT)*, yang mana apabila jumlah penduduk bertambah maka kemiskinan juga akan semakin meningkat.

4. Pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota terhadap Kemiskinan

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa variabel Upah Minimum Kabupaten memiliki pengaruh negatif tidak signifikan terhadap kemiskinan. Nilai dari koefisien regresi Upah Minimum Kabupaten sebesar -0.356416 dalam kondisi ini memiliki arti bahwa setiap Upah Minimum Kabupaten meningkat sebesar 1% maka akan menyebabkan kenaikan kemiskinan sebesar 0.35%. Kemudian jika dilihat dari hasil pengujian terhadap probabilitas yang diperoleh bernilai sebesar 0,775 yang lebih besar dari $\alpha = 5\%$ dalam hal ini menyatakan bahwa variabel Upah Minimum Kabupaten tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan pada lima kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada periode tahun 2011-2017.

Namun hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hipotesis awal yang mengatakan bahwa Upah Minimum Kabupaten berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Hal ini dikarenakan dampak kebijakan kenaikan upah yang mengakibatkan kerugian kepada para pekerja yaitu terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Pekerja yang terkena PHK disebabkan karena perusahaan tidak mampu untuk membayar upah. Para pekerja yang rentan terkena PHK adalah para pekerja yang mempunyai

produktivitas rendah, perempuan, dan pendidikan rendah. Golongan tersebut akan terkena dampak dari kenaikan Upah Minimum Kabupaten.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam penelitian ini, maka dapat didapatkan kesimpulan sebagai berikut;

1. Variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh negative dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini berarti bahwa semakin besar Produk Domestik Regional Bruto di suatu daerah, maka akan semakin menurun tingkat kemiskinan di daerah tersebut.
2. Variabel Jumlah Penduduk berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini berarti bahwa semakin banyak Jumlah Penduduk di suatu daerah, maka akan semakin tinggi tingkat kemiskinan di daerah tersebut.
3. Variabel Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini berarti bahwa meskipun Upah Minimum Kabupaten/Kota naik di suatu daerah, namun tidak mampu mengurangi tingkat kemiskinan di daerah tersebut.
4. Variabel Pendidikan berpengaruh negative dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi Pendidikan di

suatu daerah, maka akan mengurangi tingkat kemiskinan di daerah tersebut.

B. Saran

Dari penelitian yang sudah dilakukan di atas, maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagai masukan bagi pihak yang bersangkutan sebagai berikut:

1. Diharapkan pemerintah dapat meningkatkan jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dikarenakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang akan memberikan pengaruh terhadap tingkat kemiskinan, solusi untuk meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yaitu dengan pengembangan sector pariwisata, pertanian, dan perkebunan agar tingkat kemiskinan mengalami penurunan.
2. Diharapkan pemerintah dapat meningkatkan mutu jumlah penduduk dan mengontrol peningkatan jumlah penduduk, dikarenakan jumlah penduduk yang semakin tinggi akan menyebabkan tingkat kemiskinan yang tinggi. Solusi untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan sosialisasi program KB dan lebih mengutamakan tingkat pendidikan agar tingkat kemiskinan mengalami penurunan.
3. Diharapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota dapat mensejahterakan masyarakat, dimana adanya kesepakatan upah buruh dengan pengusaha/perusahaan, kebijakan pemerintah dalam menetapkan uang pesangon kepada buruh agar pegawai yang sudah tidak bekerja lagi dapat

- memulai usaha baru, dan sebaiknya memiliki program khusus yaitu berupa ketrampilan yang nantinya dapat menciptakan lapangan pekerjaan.
4. Diharapkan dari pemerintah dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah dengan memberikan beasiswa untuk masyarakat yang kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan supaya dapat menekan tingkat kemiskinan di seluruh kabupaten/kota di DIY. Dengan begitu akan meningkatkan kualitas pendidikan orang tersebut dan dapat menekan angka kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, I., & Ayuningtyas, F. (2018). Pengaruh Ekspor Dan Impor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 19(1), 1–10. <https://doi.org/10.18196/jesp.19.1.3836>
- Ayu, D. S. (2018). Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Tingkat Pengangguran Terbuka, Ipm, Jumlah Penduduk Dan Upah Minimum Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2015. 10(2), 1–15.
- Bank, W. (2000). *Jumlah Kemiskinan Dunia Pada Tahun 2015*.
- Basuki & Yuliadi. (2015). *Uji Multikolinearitas*.
- Didu, S., & Fauzi, F. (2016). Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Lebak. *Jurnal Ekonomi-Qu*, 6(1), 102–117. <https://doi.org/10.35448/jequ.v6i1.4199>
- Ginting, A. M. (2013). -1396957338. 7(1), 1–18.
- Gujarati. (2006). *Uji Multikolinearitas*.
- Handayani, S. (2017). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Penduduk, Dan Pendidikan Terhadap Kemiskinan Di Jawa Tengah 2011-2015. 4, 9–15.
- Kurniawati, N. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Dki Jakarta. *Journal Of Chemical Information And Modeling*, 53(9), 1689–1699. <https://doi.org/10.1017/Cbo9781107415324.004>

- Kuswantoro, & Dewi, I. G. P. (2016). Analisis Tingkat Pendidikan, Pdrb Dan Upah Minimum Regional Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Banten. *Jurnal Ekonomi-Qu*, 6(1), 18–35. <https://doi.org/10.35448/Jequ.V6i1.4165>
- Nugroho, P. A. (2015). Pengaruh Pdrb, Tingkat Pendidikan, Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Kota Yogyakarta Tahun 1993-2013. In *Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta*.
- Nurfauziah, F. (2017). *Analisis Pengaruh Pdrb, Tingkat Pendidikan Dan Jumlah Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2009-2015*.
- Nurfauziah, F. (2018). Analisis Pengaruh Pdrb, Pengangguran Dan Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Pulau Jawa Tahun 2009-2016. *Economics Development Analysis Journal*, 7(1), 23–31. <https://doi.org/10.15294/Edaj.V7i1.21922>
- Permana, Anggit Yoga; Arianti, F. (2012). Analisis Pengaruh Pdrb, Pengangguran, Pendidikan, Dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan Di Jawa Tengah Tahun 2004-2009. *Jurnal Iesp Fakultas Ekonomika Dan Bisnis*, 1(1), 1–12.
- Putra, K., & Arka, S. (2016). *Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka , Kesempatan Kerja , Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan Pada Kabupaten / Kota Di Provinsi Bali Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali , Indon*. 416–444.
- Rahmawati, K. D. (2017). Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pendidikan, Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Diy Periode 2006-2013. *Skripsi Univesitas Islam Sunan Kalijaga*, 1–83.
- Santiko, B. N. (2009). *Definisi Kemiskinan*. Retrieved From http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/126967-6727-analisis_keterkaitan-literatur.pdf
- Sari, S. P., & Darussamin. (2016). *Analisis Pdrb, Tingkat Pendidikan Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Selatan Periode 2004-2013*. 2(1).